

Daftar Pustaka

- Abdul Ghoffar. “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (September 2018). <https://doi.org/10.31078/jk1532>.
- Abdul Qodir. “Hasil Pemilu Legislatif 2014: PDIP Menang! Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hasil Pemilu Legislatif 2014: PDIP Menang!” *Tribunnews.com*. 10 Mei 2014. <https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/10/hasil-pemilu-legislatif-2014-pdip-menang>.
- Alya Yuliamaryam, Firdha Azkia, Prima Bhakti Persada, Wilda Nurfitriani, Hana Novia Wijaya, dan Abiyyu Ihsan Samudro. “Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017.” *Padjajaran Law Review* 6, no. 1 (2018).
- Ambaranie Nadia Kemala Movanita. “Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019.” *Kompas.com*. 17 Februari 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019>.
- Andreas W. Finaka. “Sejarah Pemilu di Indonesia: Pemilu 1955 | Indonesia Baik,” 2019. https://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemilu-di-indonesia-pemilu-1955.
- Andy Omara. “The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review.” *Constitutional Review* 3, no. 2 (21 Agustus 2018): 189. doi:10.31078/consrev323.
- Aníbal Pérez-Liñán, Nicolás Schmidt, dan Daniela Vairo. “Presidential Hegemony and Democratic Backsliding in Latin America, 1925–2016.” *Democratization* 26, no. 4 (19 Mei 2019): 606–25. doi:10.1080/13510347.2019.1566321.
- Aprilian Sumodiningrat. “Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021): 26.
- Arend Lijphart. *Thinking About Democracy, Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice*. United States of America: Routledge, 2008.
- Bagus Surya Prabowo. “Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (28 Maret 2022): 073. doi:10.31078/jk1914.
- Bambang Sunggono. *Metodologi penelitian hukum*. Cetakan Ke-15. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bisariyadi. “Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (20 Mei 2016): 473. doi:10.31078/jk1233.
- Bryan A. Garner, ed. *Black’s Law Dictionary Ninth Edition*. United States of America: Thomson Reuters, 2009.
- Charles Simabura, Ronald Rofiandri, dan Lidwina Inge Nurtjahyo. *Laporan Studi Dokumen Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Tengah*

- Pandemi Covid-19: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Ruang Partisipasi Publik.* Jakarta Selatan: Cakra Wikara Indonesia, 2021.
- Edward Lemon dan Oleg Antonov. "Authoritarian Legal Harmonization in the Post-Soviet Space." *Democratization* 27, no. 7 (2 Oktober 2020): 1221–39. doi:10.1080/13510347.2020.1778671.
- Efriza. "Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla." *Politica* 9, no. 1 (Juni 2018). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/1240/715>.
- Erwin Dariyanto. "Partai Pendukung Diprediksi Solid Usung Jokowi di Pilpres 2019." *detikNews*, 23 Juli 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3570483/partai-pendukung-diprediksi-solid-usung-jokowi-di-pilpres-2019>.
- Farida Azzahra. "Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (Juni 2021).
- Fellyanda Suci Agiesta. "Mencari Keadilan Buat Korban Gugur & Luka Demonstrasi RUU KUHP & UU KPK." *merdeka.com*. 17 Oktober 2019. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mencari-keadilan-buat-korban-gugur-luka-demonstrasi-ruu-kuhp-uu-kpk.html>.
- Gardha Galang. "Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)." Universitas Islam Indonesia, 2020. <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/38/browse?type=subject&value=Open+legal+policy>.
- Gaudensius Suhardi. "Koalisi Minyak-Air." *Media Indonesia*. 19 Mei 2022. https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2456-koalisi-minyak-air.
- Habib Shulton Asnawi. "Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (27 Agustus 2016): 299. doi:10.31078/jk1324.
- Haryono, Dodi. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (17 Februari 2022): 774. doi:10.31078/jk1843.
- Idul Rishan. "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia'." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (1 Mei 2020). doi:10.20885/iustum.vol27.iss2.art1.
- Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (28 Januari 2020): 883. doi:10.31078/jk16410.
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (8 Oktober 2019): 559. doi:10.31078/jk1636.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

- Kuswanto Kusnadi. "Mahkamah Konstitusi Dan Upaya Menegakkan Asas Presidensialisme Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (20 November 2020): 1–20. doi:10.24246/jrh.2020.v5.i1.p1-20.
- Laica Marzuki. "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2004).
- Laura Langer. *Judicial Review in State Supreme Courts*. New York: State University of New York, 2002.
- Lili Romli. "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia." *Politica* 2, no. 2 (2011): 22.
- M. Nur Rofiq Addiansyah. "Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis." *POLITEA* 2, no. 2 (17 Oktober 2019): 189. doi:10.21043/politea.v2i2.6016.
- M. Yasin al-Arif. "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (20 April 2015): 238–54. doi:10.20885/iustum.vol22.iss2.art4.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002: Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Mardian Wibowo. "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang - Undang." *Jurnal Konstitusi*, revisi, 12 (16 Maret 2015).
- Maria SW. Sumardjono. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Mohammad Ghoza F. "Presidential Threshold dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013." Universitas Gadjah Mada, 2014. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/75036.
- Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Jurnal Et Pax* 35, no. 2 (2019): 26.
- Muhammad Fadli. "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018).
- Muhammad Ilham Hermawan. *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Agus Riwanto. "Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (Oktober 2017): 644–62. doi:10.20885/iustum.vol24.iss4.art7.
- Muhammad Reza Winata. *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Murdoko. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review (Sebuah Pendekatan Sosiologis)." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan*

- Penelitian Hukum* 3, no. 1 (29 Februari 2020): 86–99. doi:10.37631/widyapranata.v3i1.89.
- Nurul Qamar. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2012). <https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/article/view/2081>.
- Pan Mohamad Faiz. “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Dimensions of Judicial Activism in the Constitutional Court Decisions).” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016). doi:10.2139/ssrn.2847500.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Radita Ajie. “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi” 13 (2016): 10.
- Ran Hirschl. *The Judicialization of Politics*. United Kingdom: Oxford University Press, 2011. doi:10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0013.
- Redaksi Antaranews. “Hasil Perolehan Suara Parpol Pemilu 2009.” *antaranews.com*. 10 Mei 2009. <https://www.antaranews.com/berita/140511/hasil-perolehan-suara-parpol-pemilu-2009>.
- Redaksi CNN. “Jokowi dan Catatan Pemerintahan SBY Baca artikel CNN Indonesia.” *CNN Indonesia*. 20 Oktober 2014. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141020121441-33-6948/jokowi-dan-catatan-pemerintahan-sby>.
- Redaksi Detiknews. “Inilah Hasil Pemilu Legislatif 2004.” *detikNews*. 5 Mei 2004. <https://news.detik.com/berita/d-155421/inilah-hasil-pemilu-legislatif-2004>.
- . “Koalisi Politik dalam Pilpres 2009.” *detikNews*. 8 Mei 2009. <https://news.detik.com/opini/d-1128354/koalisi-politik-dalam-pilpres-2009>.
- Redaksi Katadata.co.id. “Koalisi Gemuk Pemerintahan Jokowi - Infografik.” *katadata.id*. 16 Juni 2022. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/62ab148241673/koalisi-gemuk-pemerintahan-jokowi>.
- Redaksi Kompas. “Hasil Pemilu 1999, dari Partai Politik Peserta hingga Pemenang,” 30 Mei 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/30/14292041/hasil-pemilu-1999-dari-partai-politik-peserta-hingga-pemenang>.
- Redaksi Kompas .com. “Hasil Pemilu dan Pilpres 2014.” *Kompas.com*. 25 Mei 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/16004681/hasil-pemilu-dan-pilpres-2014>.
- . “Pecah Kongsi Bongkar Pasang Koalisi Pemilu 2019.” *Kompas.com*. 4 Juli 2019. <https://jeo.kompas.com/pecah-kongsi-bongkar-pasang-koalisi-pemilu-2019>.
- Redaksi Liputan 6. “Koalisi Gemuk Vs Ramping.” *Liputan 6*. 20 Mei 2014. <https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2051838/koalisi-gemuk-vs-ramping>.

- Redaksi Perpusnas. "Direktori Penyelenggaraan Pemilu - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia," 17 Mei 2006. https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=27&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=.
- Saldi Isra. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Cetakan ke-1. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Sholehudin Zuhri. "Resultan Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Politik Hukum Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (18 September 2018): 327. doi:10.31078/jk1525.
- Siti Afifiyah. "Daftar Partai Politik Pemenang Pemilu 2019." *Tagar.id*. 25 Mei 2019. <https://www.tagar.id/daftar-partai-politik-pemenang-pemilu-2019>.
- Sultoni Fikri dan Baharuddin Riqiey. "Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold di Indonesia." *Positum* 7, no. 1 (2022): 24.
- Syawaluddin Hanadi. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (13 April 2019): 349. doi:10.30863/ekspose.v16i1.92.
- Tanto Lailam. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1159/1231>.
- Tatang Guritno. "Jumlah Parpol Pendaftar Pemilu Meningkat, Perludem: Pengalaman Sebelumnya Banyak Parpol Gugur Saat Verifikasi." *Kompas.com*. 15 Agustus 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/14141021/jumlah-parpol-pendaftar-pemilu-meningkat-perludem-pengalaman-sebelumnya?page=all>.
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan. "Minim Partisipasi Rentan Represi." *pshk.or.id*, 2021. <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/minim-partisipasi-rentan-represi/>.
- Tim Penyusun. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Buku V Pemilihan Umum*. Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Vanni Anggara. "Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia." *Transformative* 5, no. 2 (2019): 20.
- Veri Junaidi. "Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai." *Jurnal Jentera* 3, no. 1 (2020): 24.
- Vitorio Mantalean. "24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya." *Kompas.com*. 15 Agustus 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/04450021/24-parpol-lolos-ke-tahap-verifikasi-calon-peserta-pemilu-2024-ini-daftarnya>.
- Wicaksana Dramanda. "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014).

- Yoga Aditya. “Sudah Diundangkan, Pembuatan UU IKN Disebut Minim Partisipasi Publik.” *Gatra*. 21 Januari 2022. <https://www.gatra.com/news-534103-Nasional-sudah-diundangkan-pembuatan-uu-ikn-disebut-minim-partisipasi-publik.html>.
- Zainal Abidin. “Penyederhanaan Partai Dalam Sistem multipartai: Tidak Konsisten.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2008): 12.
- Zainal Arifin Mochtar. *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. Depok: Rajawali Press, 2021.